

DAFTAR PUSTAKA

- Amir. 2023. *"Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilu Serentak Tahun 2024."* Journal Publicuho, Vol. 6.
- Budiardjo, Miriam. 2013. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Prima Grafika.
- Hadiawan, Agus. 2009. *Tinjauan Pemilihan Kepala Daerah Langsung di Indonesia*. Skripsi Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Hilmi, Muhammad. 2019. *Implementasi Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*. Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Karlan, Pamela. 2012. *"Democracy and Disdain."* Harvard Law Review, Vol. 126, No. 1.
- Mukthie Fadjar. 2013. *Pemilu, Perselisihan Hasil Pemilu dan Demokrasi*. Malang: Setara Press.
- Muhammad Asfar. 2006. *Pemilu dan Perilaku Memilih 1955-2004*. Pusat Studi Demokrasi dan HAM (PusDeHAM).
- Pardede, Marulak. 2014. *"Implikasi Sistem Pemilihan Umum Indonesia."* Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol. 3, No. 1.
- Pramusinto, Agus. 2004. *Otonomi Daerah dan Pemilihan Kepala Daerah dalam Mencermati Hasil Pemilu 2004*. Jakarta: UI Press.
- Prihatmoko, Joko J. 2005. *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rahmansyah, Arif & Irwandi. 2021. *"Analisis terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Kepala Daerah."* Jurnal Constitutional Law, Vol. 1, No. 3.
- Ramlan Surbakti. 2008. *Sistem Pemilu dan Tatahan Politik Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Riwanto, A. 2019. *"The Construction of Law Neutrality of State Civil Apparatus in the Simultaneous Local Election in Indonesia."* Jurnal Yuridika, Vol. 34, No. 2.
- Sadikin. 2021. *Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2020 (Studi Kasus: Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asahan Tahun 2020)*. Skripsi Universitas Sumatera Utara.
- Saputro, Maryo Adi. 2012. *Intervensi Politik*. Jakarta: Pustaka Belajar.

Sidharta, Arief. 2004. *"Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum."* Jentera (Jurnal Hukum), "Rule of Law", Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Vol. 3, No. 2.

Sri Nuryanti. 2015. *"Intervensi Penyelenggaraan Pemilu: Regulasi, Sumberdaya dan Eksekusi."* Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol. 19, No. 2.

Sumarlin, Wili. 2024. *"Dinamika Netralitas ASN dalam Partisipasi dan Dukungan Politik Menuju Pilkada Serentak 2024."* Jurnal Electoral Governance, Vol. 5, No. 2.

Tanwir, M. & Fennell, S. 2010. *"Pakistani Bureaucracy and Political Neutrality: A Mutually Exclusive Phenomenon."* Pakistan Development Review, Vol. 49, No. 3.

Internet :

Yustin Eka Yustiana. "Tak Netral, Petugas PPS di Tulungagung Terjerat Pelanggaran Etik, Proses PAW sudah Diagendakan." Portal Dnusa. <https://dnusa.id/tak-netral-petugas-pps-di-tulungagung-terjerat-pelanggaran-etik-proses-paw-sudah-diagendakan/> (diakses pada 12 November 2024 pukul 13.15).

Peraturan Perundangan-Undangan :

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Mekanisme Penanganan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu, Pasal 8-10.

Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu, Pasal 5 Ayat 2.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilu, Pasal 18 Ayat 1.